

**PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL
(STUDI KASUS: WISATA PULAU PANDANG KECAMATAN
TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA)**

SKRIPSI

OLEH:

NUR SYAHFINA SITOMPUL
228510006



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

**PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL
(STUDI KASUS: WISATA PULAU PANDANG KECAMATAN
TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

OLEH:

NUR SYAHFINA SITOMPUL

228510006

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL (STUDI KASUS: WISATA
PULAU PANDANG KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN
BATU BARA)
Nama Mahasiswa : Nur syahfina Sitompul
NPM : 228510006
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dr. Walid Mustahfa S, S.Sos, MIP

Pembimbing

Mengetahui,

Dr. Yurnia Ariel Lubis, S.Sos., M.I.P
Dekan Fakultas ISIPOL

Amma Mashudin, S.IP, M.AP
Ka Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus : 16 Maret 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Bagian-bagian tertentu dari tesis saya yang saya rujuk dari berbagai sumber ditulis dengan jelas sesuai dengan standar, prinsip, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiarisme pada skripsi saya, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik saya serta sanksi tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, April 2026

M
0000
METERAI
TEMPEL
77884X352734819
Nur Syahfina Sitompul
228510006

Dipindai dengan
CamScanner

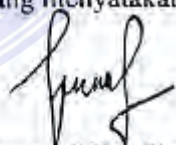
HALAMAN PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nur syahfina sitompul
Npm : 228510006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal (Studi Kasus: Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di:
Pada Tanggal: 14 April 2026
Yang menyatakan


Nur syahfina Sitompul

Dipindai dengan
CamScanner

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata lokal menjadi salah satu strategi utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis serta mendeskripsikan peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam mengembangkan pariwisata lokal di objek wisata Pulau Pandang, Kecamatan Tanjung Tiram, dengan merujuk pada teori peran pemerintah daerah Blakely yang mencakup koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara telah menjalankan perannya sebagai koordinator melalui kerja sama lintas sektor, sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana serta pembinaan masyarakat, sebagai stimulator lewat promosi wisata, dan sebagai motivator dalam mendorong partisipasi warga serta pelaku usaha lokal. Namun begitu, pengembangan pariwisata Pulau Pandang masih dihadapkan pada kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, anggaran yang terbatas, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata lokal di Pulau Pandang telah sejalan dengan indikator teori peran, namun belum optimal. Oleh karena itu diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan dukungan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar pengembangan pariwisata lokal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah; Pengembangan Pariwisata; Pulau Pandang.

ABSTRACT

The development of local tourism is one of the main strategies of the local government to improve the welfare of residents and encourage regional economic growth. This study aims to analyze and describe the role of the Batu Bara Regency Youth, Sports, Culture and Tourism Office in developing local tourism in the tourist attraction of Pulau Pandang, Tanjung Tiram District, by referring to the Blakely local government's role theory which includes coordinators, facilitators, stimulators, and motivators. The methodology used is a qualitative approach with a descriptive design. Data was collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed qualitatively.

The results of the study show that the Batu Bara Regency Youth, Sports, Culture and Tourism Office has carried out its role as a coordinator through cross-sector cooperation, as a facilitator through the provision of facilities and community development, as a stimulator through tourism promotion, and as a motivator in encouraging the participation of local residents and business actors. However, the development of tourism on Pandang Island is still faced with obstacles in the form of limited infrastructure, limited budgets, and low levels of community participation.

This study concludes that the role of local governments in the development of local tourism on Pandang Island has been in line with role theory indicators, but not optimal. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, increase budget support, and empower the community in a sustainable manner so that local tourism development can run more effectively and sustainably.

Keywords: The Role of Local Government; Tourism Development; Pulau Pandang.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Nur syahfina Sitompul, lahir di lingkungan Desa Sukaraja pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Badullah Amin Sitompul dan Fatimah. Pada tahun 2021, penulis lulus dari Smk S Teladan Indrapura dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan setahun kemudian penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama aktif dalam kegiatan perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Penulis terlibat secara aktif di Organisasi Eksternal Yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Medan Area 2022-2023 sebagai anggota di bidang Pengembangan Perempuan, kemudian pada 2024-2025 Penulis juga dilantik menjadi Kabid Eksternal Kohati Universitas Medan Area, Selanjutnya pada 2025-2026 Penulis dilantik juga sebagai Kabid (KPP). Dan pada organisasi Internal penulis diamanahkan sebagai Ketua Umum IKAMITA periode 2024-2025.

MOTTO HIDUP

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah [94]: 5-6)

“Tidak peduli berapa kali orang mencoba untuk mengkritikku, balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah”

“Something doesn't kill you
Will make you
Stronger “

(Friedrich Nietzsche)

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana”

(2026)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan pariwisata lokal (Studi kasus : Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)”. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku penanggungjawab penuh terhadap proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Medan Area.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Bapak Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.I.P..selaku penanggungjawab di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Ketua Jurusan Bapak Amas Mashudin, S,IP, M.AP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Dosen pembimbing saya Walid Musthafa Sembiring, S.Sos., M.IP yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan data maupun informasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian.
7. Untuk support system dan panutan. Ayahanda Badullah Amin Sitompul,

terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terimakasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini.

8. Untuk Mami tersayang. Mami Fatimah yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Dan beliau lah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis, sekali lagi terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.
9. Untuk kedua Abangku, Mhd.Amiruddin Sitompul dan Ibrahim Sitompul S.H Terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah perjuangan penulis. Meski kami kadang tidak akur, namun dialah alasan penulis terus berusaha menempuh pendidikan dengan

sungguh-sungguh, agar kelak penulis bisa menikmati hidup yang lebih layak tanpa bersusah payah menata hidup dan karir, Semoga apa yang sudah mereka perjuangkan hari ini dapat menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik.

10. Untuk Kedua Kakak Ipar, Ratih Nanda dan Rindy Aditya Terima kasih telah memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam setiap proses selama penulis menempuh pendidikan hingga sampai di akhir penyelesaian skripsi ini.

11. Tak lupa juga penulis menyampaikan terimah kasih yang tulus kepada Rudi Sakban Nasution, yang senantiasa setia mendampingi, memberi dukungan moral, motivasi bagi penulis, serta bantuan finansial selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, kesabaran dan dukungan yang diberikan menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

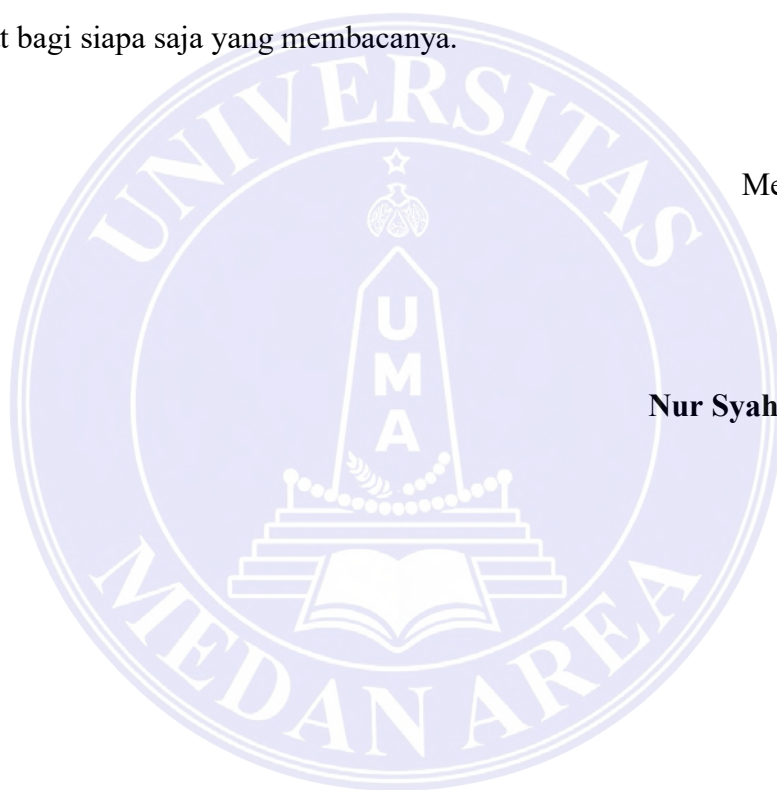
12. Kepada sahabat seperjuangan Grace Agustiani Br Tarigan dan Irma Natasya Sihotang yang sudah menjadi teman seperti saudara bagi penulis. Terimakasih untuk tangan yang selalu diulurkan, telinga yang siap mendengar, untuk setiap kebersamaan, canda tawa yang akan menjadi kenangan. Terimakasih telah hadir dalam setiap prosesku.

13. Kepada teman sedari kecil hingga sampai sekarang Bila, Nadya, Dini Terimakasih sudah selalu mensuport penulis walaupun kita saling berjauhan beda kota pisah raga sekalipun bukan segalanya.

14. Tak lupa juga penulis menyampaikan Terimah kasih kepada teman dekat saya Putri, Dinda dan widia yang selalu mensuport, mendukung dan

memberikan semangat setiap hari untuk tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun. Terakhir, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.



Medan Juli 2025
Penulis

Nur Syahfina Sitompul

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR TABEL	15
DAFTAR GAMBAR.....	16
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Peran	9
2.1.1 Pengertian Peran.....	9
2.1.2 Peran Pemerintah	11
2.2 Pariwisata	17
2.2.1 Pengertian Pariwisata.....	17
2.2.2 Pengembangan Pariwisata	20
2.4 Penelitian Terdahulu	23
2.5 Kerangka Berfikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Informan Penelitian.....	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
3.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian	34
3.5.1 Lokasi.....	34

3.5.2 Jadwal Penelitian.....	34
BAB IV	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.2 Sejarah Wisata Pulau Pandang.....	39
4.1.3 Lokasi Penelitian.....	40
4.1.4 Struktur Organisasi	42
4.1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pariwisata.....	43
4.1.6 Kantor Camat Tanjung Tiram.....	47
4.1.7 Struktur Organisasi Camat Tanjung Tiram.....	48
4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Dalam Pengembangan Wisata Pulau Pandang.....	49
4.2.2 Hambatan dan dukungan yang di hadapi dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan pariwisata pulau pandang, Kecamatan Tanjung Tiram.....	74
BAB V	85
SIMPULAN DAN SARAN	85
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	89
1. Pedoman Observasi	89
2. Pedoman Wawancara	89
3. Hasil Observasi.....	91
4. Hasil Wawancara.....	92
5. Dokumentasi.....	98
6. Surat Riset Lapangan.....	99
7. Surat keterangan Selesai Riset.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2 Informan Penelitian	32
Tabel 3 Jadwal Penelitian.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Informasi Pengunjung	5
Gambar 2 Kerangka Berfikir	27
Gambar 3 Letak Geografis Kabupaten Batu Bara	36
Gambar 4 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Persebaran.....	38
Gambar 5 Wisata Pulau Pandang Kabupaten Batu Bara	39
Gambar 6 Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara	42
Gambar 7 Struktur Organisasi Camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara	48
Gambar 8 Wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara	53
Gambar 9 Wawancara dengan Kepala Camat Tanjung Tiram.....	54
Gambar 10 Wawancara dengan Pelaku Usaha Trevel.....	56
Gambar 11 Wawancara dengan Wisatawan Pulau Pandang.....	57
Gambar 12 Kapal milik nelayan setempat untuk penyenbrangan ke pulau pandang.....	61
Gambar 13 Bangunan yang tidak selesai di Pulau Pandang	76
Gambar 14 Suasana pelabuhan Tanjung Tiram	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah kini memiliki peluang yang luas untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi daerahnya, termasuk mengelola sektor pariwisata. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan asas otonomi. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi lokal secara optimal, khususnya di bidang pariwisata, sebagai salah satu sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Suryana, 2018).

Sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain yang dapat menunjang keberlangsungannya. Wisata yang berkembang akan mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kerajinan lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Yoeti (2016) yang menyatakan bahwa industri pariwisata memiliki efek ganda (multiplier effect) dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, baik langsung melalui penerimaan devisa maupun tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain berkontribusi pada perekonomian, pengembangan pariwisata juga dapat memperkuat identitas budaya lokal. Pariwisata berbasis kearifan lokal memungkinkan masyarakat untuk melestarikan tradisi, seni, dan budaya mereka, sekaligus menjadikannya sebagai daya tarik wisata yang unik. Dengan demikian,

pengelolaan pariwisata yang baik tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan budaya (Putra & Pitana, 2019).

Batu Bara atau yang lebih dikenal dengan nama Pesisir Selat Malaka merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir timur di wilayah Sumatera Utara yang memiliki perkembangan sangat pesat. Kabupaten yang berhadapan dengan Selat Malaka ini menawarkan banyak obyek wisata menarik yang dapat dikunjungi. Seperti objek wisata alam yakni pesisir pantai pasir putih yang beradiah di daerah kecamatan Lima Puluh pesisir, pelabuhan perahu tradisional Tanjung Tiram, Pantai Buga, Pantai Alam Wisata Datuk, wisata sejarah kerajaan Lima Laras, dan wisata pulau Pandang dan Salah Namo yang berada tepat di wilaya Selat Malaka, dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya.

Di Kabupaten Batu Bara terdapat pulau-pulau yang dapat dijadikan daya tarik pariwisata bagi Sumatera Utara salah satunya adalah Pulau Pandang. Objek wisata Pulau Pandang terletak di perairan Selat Malaka, kaum nelayan menyebutnya Pulau Si Angsa Dua, karena memang bentuk fisiknya yang unik mirip unggas berleher panjang “angsa”

Pulau Pandang memiliki luas hanya ± 16 ha dan berjarak ± 15 mil laut dan ditempuh selama 2 jam dari Kuala Batu Bara (Tanjung Tiram) dengan menggunakan motor boat Destrinanda, H., Yoswaty, D., & Zulkifli, Z. (2018). Menurut Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata diatur dengan prinsip-prinsip menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan, memberdayakan komunitas lokal,

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, serta mengutamakan nilai-nilai kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, serta proporsionalitas. Oleh karena itu, pariwisata dapat dijadikan sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk pembangunan daerah.

Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukan sendiri tetapi pihak-pihak lain juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur pendamping, ini guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya. Menurut *Charles Kaiser Jr. Dan Larry E. Helber* dalam bukunya menjelaskan tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah itu dilakukan, kita akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjung wisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara sebagai pihak dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengembangkan potensi wisata di daerahnya harus mempunyai perencanaan dalam mengembangkan pariwisata serta kebijakan pariwisata yang mampu untuk memberikan manfaat kepada masyarakat maupun wisatawan dalam melakukan pengembangan. Pengembangan tersebut dapat berupa peningkatan potensi daya tarik wisata maupun meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara menempatkan pariwisata berbasis masyarakat menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk mendorong percepatan target pembangunan daerah. Pentingnya mewujudkan pengembangan destinasi wisata akan mendorong peran serta pemerintah daerah dalam menata potensi alamnya, sehingga akan berdayaguna dalam menambah pendapatan asli daerah. Pembangunan pariwisata, telah mengubah pariwisata sebagai penggerak untuk kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur.

Keunikan wisata pulau tersebut menjadi pilihan (preferensi) ketika pengunjung akan melakukan kunjungan wisata. Preferensi wisatawan merupakan pertimbangan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor infrastruktur, daya dukung hospitality, hingga dukungan dari budaya sosial masyarakat serta peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam mendukung pariwisata sehingga wisatawan tertarik untuk melakukan kunjungan ke objek wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

Namun ada beberapa permasalahan mengenai pengembangan wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram, kabupaten Batu Bara diantaranya kurang optimalnya konektivitas, akomodasi, pelayanan dasar, transportasi dan infrastruktur untuk melayani wisatawan, belum maksimal dalam memperoleh keamanan, kenyamanan serta kemudahan dalam menikmati objek wisata.

Indikator dari perkembangan pariwisata bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang berwisata dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan bahkan dari

tahun ketahun. Semakin tinggi jumlah pengunjung maka pariwisata tersebut dapat dikatakan sudah berkembang dengan baik. Sebuah obyek wisata akan banyak dikunjungi oleh wisatawan apabila didukung oleh fasilitas pendukung yang memadai, yang menarik dan yang dapat menunjang para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut.

Gambar1.
Informasi Pengunjung



Sumber : *profil unit usaha travel di Batu Bara*

Dalam mengembangkan atau menciptakan suatu objek wisata, peran pemerintah sangatlah penting karena sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika tidak ada campur tangan dari pemerintah terutama dalam penyediaan fasilitas infrastruktur, mencari wisatawan dan mempromosikan objek wisata tersebut.

Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan objek wisata yang berada di Kabupaten Batu Bara sangat penting karena dengan campur tangan pemerintah dalam pengembangan pariwisata akan menimbulkan dampak yang sangat baik bagi

pariwisata itu sendiri, pariwisata di Kabupaten Batu Bara tidak sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah karena dalam pelaksanaannya seperti infrastruktur dan sarana pra-sarana yang mendukung sudah di buat oleh masyarakat setempat yang berada di sekitar lokasi wisata. Salah satu tantangan terbesar yang di hadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan objek wisata secara efektif dan efisien.

Dalam rangka proses pengembangan di atas maka salah satu tugas penting yang harus dilakukan atau di kerjakan pemerintah Kabupaten Batu Bara. Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini adalah membangun serta mempromosikan sumberdaya pariwisata yang ada di Kabupaten Batu bara karena itu sangat perlu adanya pengembangan lingkungan yang terencana oleh pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata ke depannya.

Dalam sebuah pengelolaan wisata perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata tersebut memiliki nilai jual yang sangat berharga baik dari sejarahnya atau pun karena jumlahnya yang terbatas di dunia ini. Hal tersebut dapat dimulai dari potensi yang dimiliki suatu wilayah, adat istiadat, perkembangan ekonomi, sampai aspek politik.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BATU BARA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL (STUDI KASUS: WISATA PULAU PANDANG KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka susunan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal di Pulau Pandang, Kecamatan Tanjung Tiram?
2. Apa saja hambatan dan dukungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan pariwisata pulau pandang, Kecamatan Tanjung Tiram ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang di ajukan dalam penelitian ini, Maka tujuan penelitian dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan pariwisata lokal di Pulau Pandang, Kecamatan Tanjung Tiram.
2. Untuk mengetahui hambatan atau dukungan yang dihadapi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata lokal Pulau Pandang,Kecamatan Tanjung Tiram.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

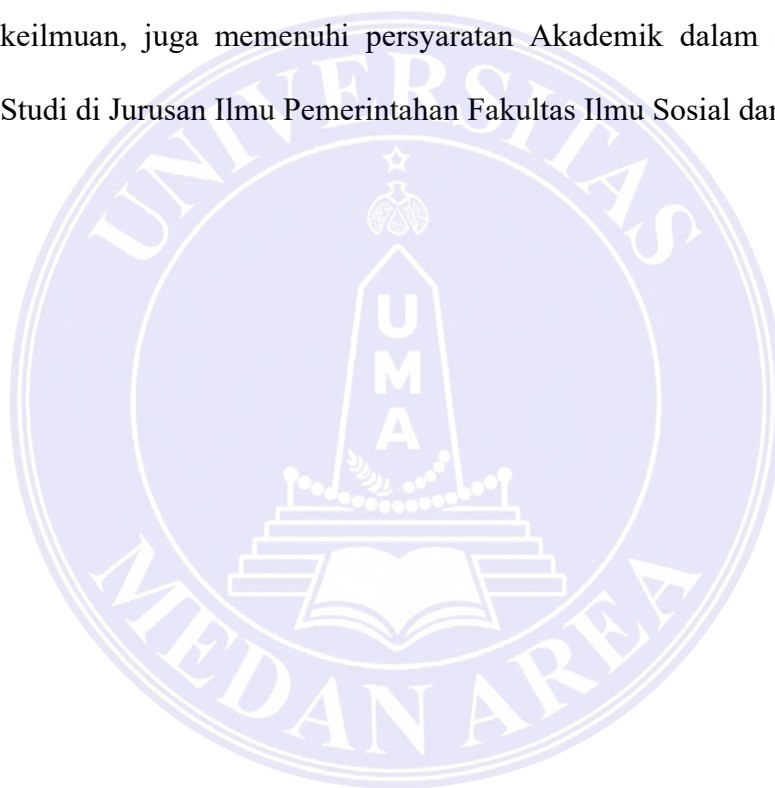
1. Manfaat praktis

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal yang berkelanjutan dan berdampak pada

ekonomi masyarakat Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Tanjung Tiram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan informasi khususnya kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal pulau pandang Kabupaten Batu Bara Kecamatan Tanjung Tiram dan dapat dijadikan referensi dalam bahan keilmuan, juga memenuhi persyaratan Akademik dalam menyelesaikan Studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu, bila yang diartikan dengan peran adalah, perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Mengacu pada penjelasan diatas peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

1. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
2. Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Soekanto tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa peran mencakup tiga aspek. Aspek tersebut adalah penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jadi dapat

disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat tingkah atau perilaku sesuai dengan norma dan aturan, yang diharapkan dimiliki oleh individu maupun organisasi berkaitan dengan kedudukan atau statusnya dalam masyarakat.

Peran instansi pemerintah daerah dalam pengembangan sektor publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk peran utama sebagai berikut:

1. Peran sebagai (*Regulator*) adalah peran instansi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program strategis sebagai dasar pelaksanaan pengembangan sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Peran sebagai (*Fasilitator*) adalah peran instansi pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan sumber daya, sarana, dan prasarana guna menunjang keberhasilan program pengembangan sektor publik.
3. Peran sebagai Pembina merupakan peran instansi pemerintah daerah dalam memberikan arahan, pendampingan, serta peningkatan kapasitas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan.
4. Peran sebagai Pengawas dan *Evaluator* merupakan peran instansi pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan pembangunan sektor terkait

Berdasarkan peran instansi pemerintah daerah dalam pengembangan sektor publik diwujudkan melalui fungsi sebagai regulator, fasilitator, pembina, serta pengawas dan evaluator. Keempat peran tersebut harus dijalankan secara terpadu agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah (Rasyid, 2007; Ndraha, 2011; Manurung

et al., 2020).

2.1.2 Peran Pemerintah

Untuk memenuhi kemampuan dan keterlibatan Masyarakat ada peran pemerintah untuk memberikan informasi, pelatihan, Pendidikan bahkan menyiapkan regulasinya dalam membangun dan mengembangkan pariwisata sebagai daya Tarik wisata. Dikaitkan dengan pemberdayaan maka peran pemerintah yang sesuai dengan nilai - nilai pemberdayaan dapat diambil salah satunya adalah menurut Munir (2016) terdiri dari entrepreneur, koordinator, dan fasilitator. Ketiga indikator tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar peran yang dilakukan oleh pemerintah. Maka hasil penelitian yang dilakukan terkait peran pemerintah maka diperoleh informasi:

- a. *Euntrepreneur*, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membangun dan melaksanakan Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan. Hal ini membangun Masyarakat mampu menggali potensi yang dimiliki yang rutin menjadi mata pencaharian mereka dan menjadikan double income, sedangkan untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi peluang kerja sebagai akibat ada tambahan Aktivitas wisata. Aktivitas usaha yang dibangun dengan mengembangkan pariwisata.

- b. *Koordinator*, membangun pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. Perlu membangun koordinasi antar dinas dan sektor lain yang dikenal dengan Pentahelik (pemerintah, masyarakat, akademisi, usaha pariwisata dan media). Koordinasi dengan dinas lain juga diperlukan karena pariwisata akan bersinggungan dengan berbagai dinas dalam memenuhi aksesibilitas, jalan, bangunan perlu berhubungan dengan dinas PUPR, rambu rambu lalu lintas sebagai penamaan dan penunjuk arah akan berhubungan dengan dinas Perhubungan. Berkaitan dengan sampah, taman dan lingkungan juga berhubungan dengan dinas-dinas terkait di bidangnya hal ini memerlukan kolaborasi antar instansi dengan leading sektornya dinas kebudayaan dan pariwisata.
- c. *Fasilitator*, peran pemerintah sebagai fasilitator mempercepat Pembangunan melalui perbaikan lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan usaha, dapat dilihat lingkungan apa yang tidak baik untuk suatu usaha.

Peran pemerintah dalam membangun lingkungan yang sehat merupakan hal yang sangat penting keindahan dan nyaman untuk berkunjung merupakan kunci utama dalam berwisata sehingga peningkatan fasilitas yang menunjang perlu lebih difokuskan untuk disediakan.

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang menjalankan urusan pemerintahan otonom, tidak termasuk DPRD. Penekanan ini sejalan dengan pengaturan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, di mana

kepala daerah menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan anggaran dan kebijakan fiskal daerah.

Menurut Hoessein dalam Muluk (2009:57) Pemerintahan Daerah (local government) merupakan sebuah konsep yang memiliki tiga arti untuk membatasi dan memahaminya yaitu diantaranya adalah :

1. Pemerintah lokal yang sering dipertukarkan dengan local authority yang mengacu pada organ yakni council dan major dimana rekrutmen pejabat didasarkan atas dasar pemilihan.
2. Memacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini mengacu pada fungsi, dalam menentukan fungsi kewenangan pemerintah daerah terdapat dua fungsi yaitu:

Pertama yaitu *the ultra vires doctrine*, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memberikan pelayanan tertentu saja. Fungsi atau urusan pemerintah bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi dan urusan pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat.

Kedua yaitu *prinsip general competen atau open end aragement*, pemerintah daerah memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh pengambil keputusan di daerah itu. Pemerintah pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sementara itu sisanya merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

3. Bermakna daerah otonom. Bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran situs ekonomi berdasarkan atas inspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah

tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintah menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dengan tiga konsep yang disebutkan diatas menjelaskan bahwa pemerintahan daerah mempunyai tugas dan peranan masing-masing. Adapun secara teoritis keberadaan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari berbagai ilmu :

“Dalam ilmu politik keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan publik karena bertambahnya kesempatan dan penawaran *public goods*. Dalam ilmu administrasi pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam berdasarkan kebutuhan yang beragam berdasarkan kebutuhan yang beragam disetiap lokasi yang berbeda. Kemudian dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintah mencerminkan strategi intregrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi (Muluk, 2009:70)”.

Secara umum, peran pemerintah daerah mencakup semua tindakan yang dilakukan dalam implementasi otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Peran Pemerintah merupakan segala kegiatan atau upaya yang terkoordinasi, berasal dari kedaulatan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip negara, yang berkaitan dengan penduduk dan wilayah negara dengan tujuan mencapai tujuan negara (Haboddin, 2015) dalam (Alfianto, 2021).

Peran pemerintah juga dipaparkan oleh Blakely, dalam Mudrajat Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata pada kawasan wisata lokal sebagai :

1. *Koordinator* : peran pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan atau strategi bagipembangunan daerah wisata dengan merangkul semua komponen masyarakat sebagai actor utama dalam aksi pembangunan tersebut. Peran pemerintah sebagai coordinator mewadahi asosiasi di bidang pariwisata baik dalam tingkat lokal, regional, maupun internasional.Koordinasi juga berarti bahwa pemerintah berwenang membuat system koordinasi antara setiap sektor yang saling berkaitan dalam industri pariwisata.
2. *Fasilitator*: peran pemerintah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan yang terdiri dari berbagai kalangan. Sebagai fasilitator,pemerintah melakukan pendampingan, pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan dalam pendanaan dan permodalan kepada masyarakat lokal yang diberdayakan.
3. *Stimulator* : peran pemerintah sebagai stimulator yakni menciptakan strategi untuk membangun daya tarik wisata. Pemerintah menyusun

strategi yang di implemantasikan dalam rangka mengembangkan daya tarik wisata. Artinya pemerintah memberikan stimulus seperti contoh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat menyediakan kantin sehingga keuntungan yang didapatkan bisa dirasakan baik pemerintah daerah, masyarakat, dan wisatawan.

4. *Motivator* : peran pemerintah sebagai motivator diperlukan untuk memotivasi usaha pariwisata terus berjalan. Baik investor, masyarakat lokal, pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang harus dimotivasi agar perkembangan pariwisata tetap berjalan dengan baik. Contoh seperti pemberian lahan usaha tanpa memungut biaya untuk masyarakat dan meningkatkan promosi pariwisata.

Peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata menurut (Subadra, 2006) yang dikutip dalam (Afandi, Sunarti, & Hakim, 2017) yaitu (Conyers & Hills, 1984) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, yang mencakup keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan sangat penting, mengingat, dengan perencanaan pembangunan, maka, akan mengangkat citra, potensi, dan daya saing suatu daerah. karena itu perencanaan pembangunan harus memiliki sistem agar perencanaan pembangunan tidak salah sasaran, dan tepat guna.

Perencanaan pembangunan dalam konteks pariwisata merupakan pondasi awal bagi pemerintah dalam mengambil peran yang penting dan strategis, mengingat pemerintah adalah pengambil keputusan, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan baik dalam segi sarana dan prasarana maupun aksesibilitas.

2.2 Pariwisata

2.2.1 Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar atau berkeliling. Sedangkan wisata berarti berpergian. Secara garis besar pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik secara kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar (Suwanto, 2004).

Istilah Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu juga karena kepentingan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan lain dan bukan untuk kegiatan yang menghasilkan upah (Suwanto, 2004).

Pariwisata merupakan suatu aktivitas kepergian sementara dari seorang, menuju ke daerah lain di luar domisilinya (Suwantoro, 2002). Ia melakukan kegiatan bepergian karena berbagai kepentingan yang beragam, Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai jenis aktivitas pariwisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disiapkan oleh berbagai pelaku pariwisata.

Berdasarkan pengertian pariwisata tersebut, dapat dipahami bahwa pariwisata merupakan suatu fenomena sosial yang melibatkan pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu yang bersifat sementara. Pergerakan ini tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan perjalanan, tetapi juga pada masyarakat dan wilayah yang menjadi tujuan wisata. Oleh karena itu, pariwisata tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang saling berkaitan (Suwantoro, 2004).

Pariwisata sebagai aktivitas sosial memiliki peran penting dalam mempertemukan berbagai latar belakang budaya, nilai, dan kebiasaan. Interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal menciptakan proses pertukaran budaya yang dapat memperkaya wawasan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pariwisata berfungsi sebagai media komunikasi lintas budaya yang mampu memperkuat toleransi dan saling pengertian antarindividu maupun kelompok sosial (Sunnyoto Usman, 2006). Namun demikian, proses alkulturasi budaya yang terjadi juga perlu dikelola dengan bijaksana agar tidak menghilangkan identitas budaya lokal.

Selain sebagai fenomena sosial budaya, pariwisata juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Aktivitas pariwisata mampu menciptakan peluang usaha

dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha di bidang akomodasi, transportasi, kuliner, dan jasa lainnya berkembang seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Suwantoro (2002) bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pariwisata juga berkaitan erat dengan motivasi individu dalam melakukan perjalanan. Dorongan untuk berwisata tidak hanya didasarkan pada kebutuhan rekreasi, tetapi juga kebutuhan pendidikan, kesehatan, keagamaan, serta pengembangan diri. Aktivitas wisata yang dilakukan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan memberikan nilai tambah bagi wisatawan, sehingga pariwisata tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan hiburan, melainkan juga sebagai sarana pembelajaran sosial dan budaya (Suwantoro, 2004).

Pariwisata dipandang sebagai arena interaksi sosial yang kompleks. Dimensi politik dan bisnis dalam pariwisata mencerminkan adanya kepentingan kekuasaan dan ekonomi yang mempengaruhi pengelolaan serta pengembangan destinasi wisata. Oleh karena itu, kebijakan pariwisata perlu dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat setempat (Sunyoto Usman, 2006).

2.2.2 Pengembangan Pariwisata

Munasef (1995:1) menyatakan bahwa: “pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan”.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian, dimana sektor pariwisata berperan penting dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi. Industri pariwisata dapat diartikan sebagai agen perubahan budaya yang mempengaruhi individu, kelompok dan cara berpikir (Poerwanto, 2018). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata harus direncanakan dengan matang, karena jika tidak ada rencana strategis dalam pengembangan pariwisata maka akan berdampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Salah satu faktor positif pengembangan pariwisata pasca pandemi bagi masyarakat adalah pengembangan pariwisata yang tepat guna, kerjasama merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan pariwisata, karena negara bukan satu-satunya aktor disini. Menurut Yoeti (2007:77) pengembangan pariwisata sangat diperlukan, beberapa alasan mengapa perlunya pengembangan pariwisata :

1. Alasan utama pengembangan pariwisata di destinasi wisata, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional suatu negara, sangat terkait erat dengan upaya meningkatkan perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, perkembangan sektor pariwisata di suatu destinasi selalu dipertimbangkan berdasarkan potensi keuntungan dan manfaatnya bagi penduduk setempat.
2. Alasan kedua mengapa pengembangan pariwisata cenderung lebih bersifat

non-ekonomis adalah karena motivasi utama wisatawan yang datang berkunjung ke suatu destinasi pariwisata adalah untuk menikmati dan mengamati kecantikan alam, termasuk di dalamnya cagar alam, kebun raya, lokasi bersejarah, candi-candi, bangunan kuno, perkebunan, dan ladang pertanian.

3. Alasan ketiga untuk mengembangkan sektor pariwisata adalah untuk mengatasi keterbatasan dalam berpikir, mengurangi kesalahpahaman, dan memungkinkan pemahaman terhadap perilaku orang yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat di wilayah di mana proyek pariwisata tersebut diterapkan. Adanya pertukaran ide dan interaksi antara wisatawan dan penduduk setempat dapat membuka wawasan penduduk setempat dalam berbagai hal. Perbedaan pandangan, interpretasi, dan kesalahpahaman dapat diatasi melalui kegiatan pariwisata. Hal ini disebabkan oleh prinsip dalam bisnis pariwisata, di mana pelayan wisatawan diharapkan untuk bersikap tanpa diskriminasi terhadap ras, bangsa, dan agama.

Pengembangan pariwisata dapat dipahami sebagai suatu proses yang menuntut adanya perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan. Keterpaduan dalam pengembangan pariwisata mencakup keterlibatan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat lokal, agar seluruh potensi wisata dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab (Munasef, 1995).

Pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai penggerak sektor-sektor ekonomi lainnya seperti transportasi, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata memiliki efek berganda (multiplier effect) yang

signifikan terhadap perekonomian masyarakat (Yoeti, 2007).

pariwisata juga memiliki implikasi sosial dan budaya yang luas. Sebagaimana dikemukakan oleh Poerwanto (2018), industri pariwisata berperan sebagai agen perubahan budaya yang mampu memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu diarahkan agar perubahan yang terjadi bersifat positif dan tidak mengikis nilai-nilai sosial serta budaya lokal.

Perencanaan strategis menjadi elemen penting dalam pengembangan pariwisata agar dampak negatif terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Pengembangan pariwisata yang tidak terencana berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketimpangan sosial, konflik kepentingan, dan degradasi lingkungan. Sebaliknya, pengembangan pariwisata yang tepat guna dan berorientasi pada keberlanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan daerah tujuan wisata (Yoeti, 2007).

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan sektor swasta dan partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antar aktor ini diperlukan untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkeadilan, sehingga manfaat pengembangan pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Munasef, 1995).

Pengembangan pariwisata bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga untuk mendorong pembangunan ekonomi, memperkuat kohesi sosial, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antarbudaya. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pandangan Yoeti (2007) yang menegaskan bahwa pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan

nasional dan daerah apabila dikelola secara terencana dan berkelanjutan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tolak ukur peneliti untuk melakukan penelitian. Dengan catatan penelitian terdahulu harus relevan atau memiliki korelasi yang kuat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
1	Januardi Deki	Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan di Kabupaten Bangkayang	2019	Peran Pemerintah Daerah Sebagai Motivator, fasilitator, dan dinamisator.
2	Dinda Ayu Sekarini	Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Mojokerto (studi pada desa wisata	2024	Peran Pemerintah Daerah Berdasarkan Kewenangannya dalam Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame a. Peran Pemerintah daerah sebagai Fungsi Alokasi
		Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)		b. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fungsi Distribusi c. Peran Pemerintah Daerah sebagai fungsi Stabilisasi

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
3	Endah Dwi Lestari, Yoseb Boari, Melyanus Bonsapia, Silas Marcelino Anes.	Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor	2023	peran pemerintah terhadap pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai motor dari penggerak pariwisata sendiri sudah melakukan berbagai terobosan-terobosan dalam mengembangkan wisata dan daya tarik wisata sehingga sektor pariwisata yang dimiliki menjadi berkembang setelah mendapatkan pengembangan pengembangan dari pemerintah daerah.
4	Putu Sukma Wahyuni Dewi	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata Pakseballi di Kabupaten Klungkung	2021	Hasil menunjukkan bahwa masyarakat lokal dan pengelola desa wisata sangat setuju dengan program pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Pakseballi. Peran sebagai sudah memfasilitasi program, proyek dan kegiatan memberikan inovasi, mengikutsertakan masyarakat berpartisipasi, evaluator, menilai penelitian pemerintah fasilitator pariwisata, 1. Penelitian ini sama meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata 1. Perbedaan Lokasi dan situs penelitian yang berbeda yaitu di desa

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				wisata Pakseballi Kabupaten Klungkung, 2. Menggunakan metode penelitian yang berbeda yaitu untuk adanya sosialisasi dan bantuan dana. Sebagai pemerintah program program yang sudah terlaksana, memantau pembangunan pariwisata dan membuat kepuasan, survei sebagai implementer, pemerintah memimpin dan mengkoordinasikan program, proyek dan kegiatan untuk pengembangan wisata, desa menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait dan mengatur pengembangan pariwisata membuat seperti standar kelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan. Dari keempat peran tersebut, peran pemerintah sebagai mendapatkan tertinggi fasilitator nilai yaitu sebagai 4,35, evaluator mendapatkan nilai terendah yaitu 4,21.
5	Afandi, A., Sunarti, & Hakim, L.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gresik)	2017	Pemerintah daerah melalui Disbudparpora memiliki peran dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan Pulau Gili Noko yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah melalui Disbudparpora memberikan wewenang kepada perangkat desa untuk membuat peraturan mengatur dalam kegiatan pariwisata di Pulau Gili Noko dalam bentuk peraturan desa. Pemberian wewenang tersebut didasari

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil
				karena Disbudparpora menganggap bahwa masyarakat yang lebih tahu akan kondisi yang ada di Pulau Bawean khususnya Pulau Gili Noko sehingga Disbudparpora tidak ingin membatasi masyarakat di Pulau Gili Noko dalam melakukan pengembangan dengan membuat peraturan peraturan ditetapkan Disbudparpora.

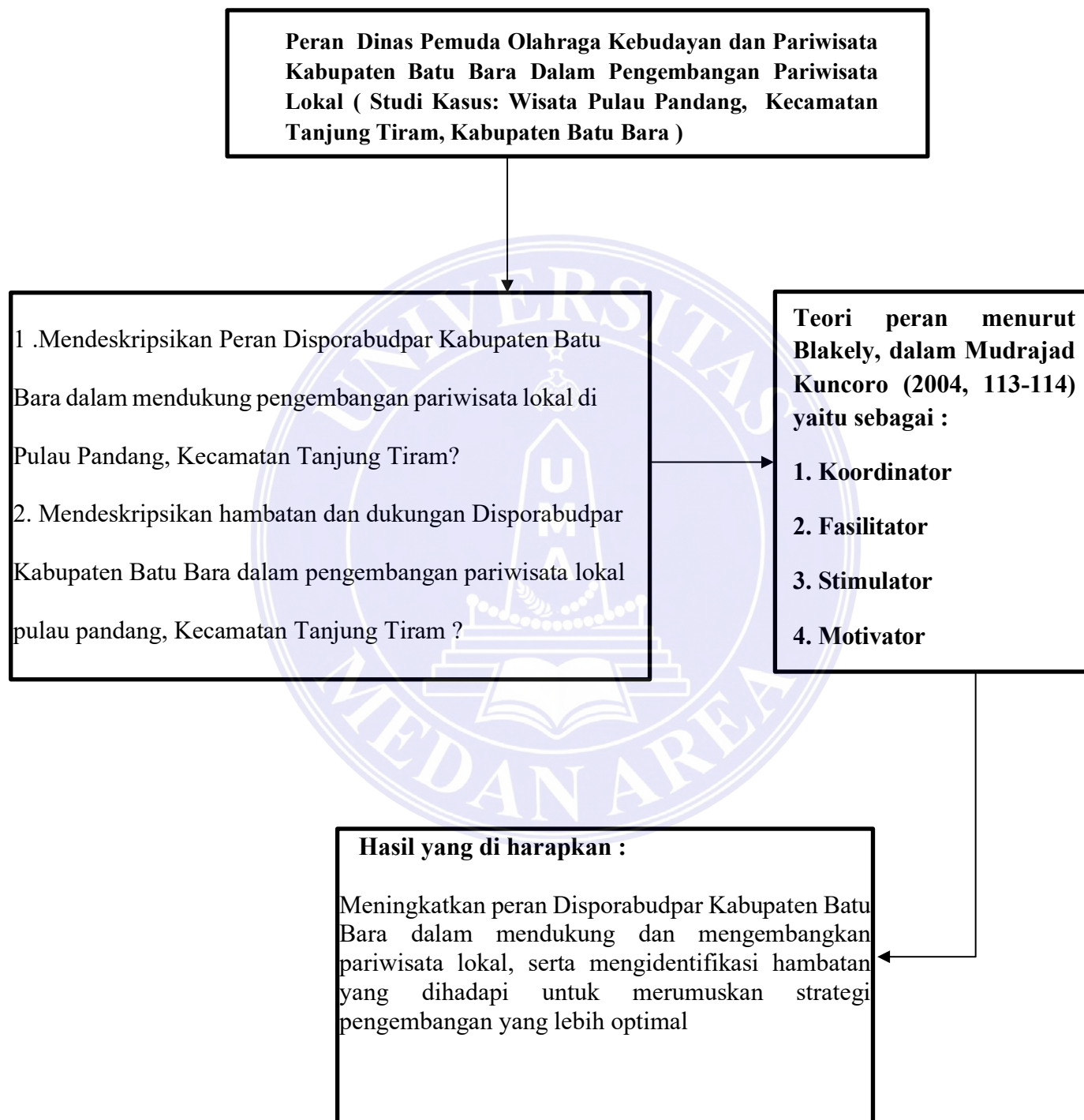
Sumber : Dikelola Penulis (2025)

2.5 Kerangka Berfikir

Menurut Sugiono dalam Nanda (2022:24) kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai keterkaitan teori yang digunakan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai rumusan masalah yang penting. Kerangka berpikir menjelaskan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Peneliti menggunakan Teori peran menurut Blakely, dalam Mudrajat Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata pada kawasan wisata lokal sebagai Koordinator, Fasilitator, Stimulator, dan Motivator. Berikut kerangka berpikir yang digambarkan peneliti dari “ Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal (Studi Kasus: Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara) yaitu :

Gambar 2.
Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan sebuah metode terhadap proses menganalisis data yang memberikan gambaran secara jelas terhadap suatu penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ngatno (2015:22) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada pemahaman terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sosial sesuai dengan kondisi realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.

Tujuan ini sejalan dengan konsep pendekatan kualitatif yang didefinisikan oleh Miles, Huberman, dan Sadana (2014). Mereka menyatakan bahwa pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, dan perekaman audio. Meskipun data kemungkinan telah melalui proses seperti pencatatan, pengetikan, penyuntingan, analisis kualitatif tetap mempertahankan penggunaan kata-kata yang disusun dalam teks yang lebih rinci.

Sugiyono (2019:17) juga menyatakan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan kondisi alamiah yang memandang realita sosial merupakan bagian yang utuh. Dengan objek alamiah yang sesuai dengan apa adanya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam penelitian ini dengan melakukan metode penelitian secara kualitatif, peneliti akan

menjelaskan fenomena–fenomena realitas sosial yang kompleks, dan terinci dalam memandang dan menjawab bagaimana Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal (Studi Kasus: Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (Burhan Bungin, 2010).

Maka dari itu, informan yang ditetapkan pada penelitian ini merupakan pihak–pihak yang dapat dipercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data data terhadap penguasaan masalah dan mampu menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan informan dalam penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. Informan Penelitian

Uraian	Nama	Jumlah	Keterangan
Kepala Dinas	Widaruna S.E	1	Informan kunci
Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Batu Bara		1	Informan Utama
Camat	Muhammad Iqbal, S.Sos.,M.AP	1	Informan Tambahan
Pelaku Usaha pariwisata lokal	Bayu Adrian	1	Informan Tambahan
Wisatawan	Muhammad Pierre Dellon	1	Informan Tambahan

Sumber : Data Penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Rahmadi,2011:75) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data di bagi menjadi enam bagian di antaranya adalah observasi, wawancara, angket, dokumenter, penelusuran data online, dan instrument pengumpul/penggali data. Namun pada teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti mengambil tiga teknik saja yang sesuai dengan metode penelitian ini, diantara nya yaitu:

1. Teknik Observasi

Menurut (Rahmadi, 2011:80) Observasi merupakan kegiatan dengan cara-cara mencatat dengan sistematis mengenai tingkah laku melalui penglihatan atau pengamatan terhadap perilaku individu atau kelompok yang diteliti secara

langsung. Kemudian dalam hal ini peneliti melakukan observasi berbentuk partisipan yaitu peneliti terjun langsung ke objek penelitian kemudian melihat bagaimana Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal (Studi Kasus: Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).

2. Teknik Wawancara

Menurut (Rahmadi, 2011:75) wawancara merupakan mengumpulkan data melalui dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pelaku yang diwawancarai secara lisan. Dalam Teknik ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam. Maksud dari wawancara secara mendalam adalah wawancara tidak terstruktur yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang cukup lama terhadap informan di objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang detail terhadap informasi yang dipilih.

3. Dokumentasi

Menurut (Rahmadi, 2011:85) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui beberapa dokumen (informasi yang di dokumentasikan). Dokumen baik berupa tertulis atau terekam. Dokumen tertulis seperti arsip, catatan harian, surat, klipping, dan sebagainya, sedangkan dokumen terekam seperti foto, video, film, dan sebagainya.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2019:319) analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis oleh data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lainnya, yang mana akan memudahkan terhadap pendalaman, dan hasil temuan dapat di informasikan kepada orang lain.

Penyajian data yang baik merupakan cara analisis kualitatif yang valid dan selanjutnya membangun proposisi (kaitan antara konsep) dengan mengumpulkan sejumlah interaksi antara masyarakat dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal (Studi Kasus: Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).

Penjelasan mengenai empat tahapan aktivitas, sebagaimana yang telah diungkap oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan pengumpulan data adalah proses menghimpun informasi sesuai dengan jenis dan karakteristik data yang diperlukan, khususnya terkait dengan peran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Lokal. Proses pengumpulan data ini melibatkan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan secara komprehensif mengumpulkan data yang terkait dengan ruang lingkup penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan

data sebanyak mungkin yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah yang diterapkan dalam upaya pengembangan Pariwisata Lokal . Tujuan dari pengumpulan data yang sebanyak mungkin adalah untuk memberikan panduan kepada peneliti terkait strategi yang diimplementasikan berdasarkan fokus penelitian ini.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan aktivitas yang mencakup pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber, termasuk catatan lapangan, wawancara, transkrip, dokumen, dan data lapangan lainnya. Proses pengumpulan data dari lapangan termasuk dalam kategori kondensasi data. Pada tahap ini, peneliti akan menyederhanakan dan memilih data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara di lapangan yang relevan dengan judul penelitian. Seleksi data perlu dilakukan karena jumlah data yang terkumpul cukup besar, dan tidak semua data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Data yang akan diekstrak oleh peneliti mencakup strategi strategi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah, serta faktor faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi- strategi tersebut.

3. Display Data (*Data Display*)

Kegiatan ini berbentuk penyajian data setelah dilakukan nya reduksi data. Dalam hal ini dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, ikhtisar yang tujuannya agar mudah dipahami oleh pembaca.

4. Simpulan (*Conclution*)

Pada penelitian kualitatif, simpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban daripada rumusan masalah yang diambil. Simpulan harus didukung oleh bukti–bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.5.1 Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat di mana diambilnya beberapa sampel dan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara serta lingkungan Wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.

3.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan, proses penelitian dimulai dengan proses pengkajian literatur, penyusunan proposal, penyusunan instrument hingga penyerahan final skripsi, seperti tabel berikut :

Tabel 3
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2025												2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	Pengumpulan Data															
2	Penginputan Data dan Penyusunan Proposal															
3	Bimbingan															
4	Pendaftaran Seminar Proposal															
5	Seminar Proposal															
6	Revisi Proposal dan Persiapan Pedoman Riset															
7	Permohonan Surat Riset															
8	Penelitian															
9	Pendaftaran Seminar Hasil															
10	Seminar Hasil															
11	Pendaftaran Sidang															
12	Sidang															
13	Penyerahan Skripsi															

Sumber : Data diolah (2026)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan pariwisata Pulau Pandang di Kecamatan Tanjung Tiram, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas telah berkontribusi dalam pengembangan Wisata Pulau Pandang melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, pelaku usaha, dan masyarakat; pemberian fasilitas dasar dan promosi; serta mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan pariwisata. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal, karena koordinasi masih cenderung terpusat, promosi belum mencapai wisatawan secara langsung, dan fasilitas pendukung serta aksesibilitas masih terbatas. Oleh karena itu, meskipun peran Dinas telah berjalan, masih diperlukan penguatan agar pengembangan destinasi menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
2. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur, belum adanya kontribusi dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) di destinasi, keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan, minimnya sarana transportasi penyeberangan resmi, kurangnya fasilitas pendukung seperti lahan parkir dan informasi destinasi, serta implementasi program yang belum maksimal di lapangan. Di sisi lain, dukungan yang ada mencakup komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan pengembangan wisata, partisipasi masyarakat lokal seperti nelayan dan Karang Taruna, dukungan administratif untuk pelaku usaha,

serta kesiapan pemerintah kecamatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara perlu memperkuat sistem koordinasi yang kolaboratif dan desentralisasi dengan melibatkan pemerintah kecamatan, pelaku usaha, serta masyarakat lokal dalam satu mekanisme pengelolaan yang jelas dan terstruktur. Penguatan tata kelola ini harus mencakup pembagian peran yang jelas, optimalisasi kewenangan, penyusunan regulasi pengelolaan dan retribusi untuk mendukung PAD, serta pembinaan berkelanjutan kepada kelompok masyarakat agar pengembangan Wisata Pulau Pandang berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
2. Pemerintah daerah bersama Dinas perlu memprioritaskan peningkatan akses transportasi penyeberangan resmi, penyediaan fasilitas dasar (seperti lahan parkir, informasi tentang destinasi, dan kebersihan), serta penataan kawasan wisata untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Selain itu, strategi promosi harus diperkuat melalui metode digital dan upaya langsung ke pasar wisata dengan pengemasan konten yang menarik serta kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha, sehingga Wisata Pulau Pandang dapat lebih dikenal luas dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ayuningtyas, D., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata edukasi gerabah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 13-31.
- Lestari, E. D., Boari, Y., Bonsapia, M., & Anes, S. M. (2023). Peran Pemerintah Terhadap Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. *Journal Of Economics Review (Joer)*, 3(1), 21-35.
- Afriza, L. (2024). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Wisata Kota Bandung. *Manajemen dan Pariwisata*, 3(1), 99-106.
- Dewi, P. S. W., Lilasari, L. N. T., & Saputra, I. G. G. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Desa Wisata Pakseballi di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Makardhi*, 1(1), 52-62.
- Nugraha, Y. E. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan daya tarik wisata alam di Kabupaten TTS: Studi kasus daya tarik wisata Pantai Oetune. *Media Wisata*, 19(1).
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1-20.
- Kuswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90-113.
- Panjaitan, P. D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Sosialisasi literasi keuangan bagi anggota paguyuban Pemandian Alam Sejuk (PAS) di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe* Manoktok Hitei, 2(2), 41-53.
- Priambodo, B. (2022). Proses Pengembangan Pariwisata Di Kota Surabaya Antara Pemerintah Dan Non Pemerintah Dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*,

2(2), 35-42.

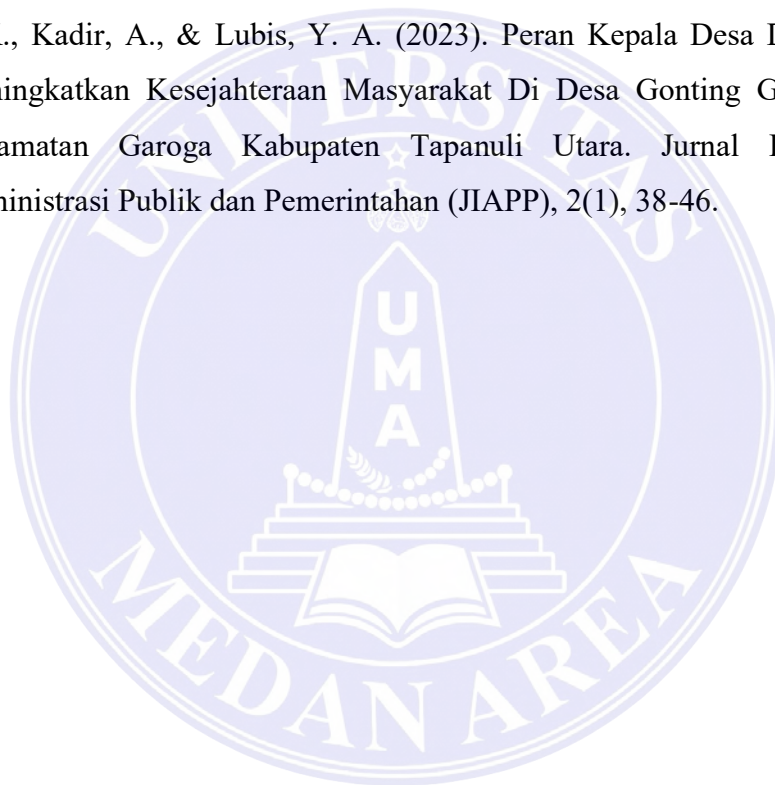
Poerwanto, H. (2018). *Budaya dan Pariwisata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yoeti, O. A. (2007). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Munasef. (1995). *Dasar-dasar Pengembangan Pariwisata*. Jakarta.

Manurung, R. R. Br., Nasution, I., & Sembiring, W. M. (2020). Peran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara dalam Upaya Pengembangan Sekolah Luar Biasa Negeri Autis.

Pasaribu, K., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2023). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAPP)*, 2(1), 38-46.



LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi

**PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BATU BARA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
LOKAL
(STUDI KASUS: WISATA PULAU PANDANG KECAMATAN TANJUNG
TIRAM KABUPATEN BATU BARA)**

Pedoman observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data secara langsung di lapangan mengenai Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal di Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram.

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

No	Yang di amati	Ya/Tidak
1	Kondisi umum objek wisata Pulau Pandang	
2	Sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan wisata Pulau Pandang	
3	transportasi menuju Pulau Pandang.	
4	Aktivitas wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang.	

2. Pedoman Wawancara

**PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BATU BARA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA LOKAL
(STUDI KASUS: WISATA PULAU PANDANG KECAMATAN TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATU BARA)**

Keterangan	Identitas Responden	Pertanyaan Pertanyaan
Informan Utama	Nama : Widaruna S.E Jenis Kelamin : Laki-Laki Umur : 45 Tahun Pekerjaan : Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara	1. Bagaimana peran dinas dalam pengembangan wisata Pulau Pandang? 2. Program apa saja yang telah dilakukan untuk mengembangkan wisata Pulau Pandang? 3. Bagaimana bentuk kerja sama

		antara dinas dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat? 4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata Pulau Pandang? 5. Apa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan potensi wisata Pulau Pandang?
Informan Tambahan	N a m a : Muhammad Iqbal, S.Sos.,M.AP Jenis Kelamin : Laki-Laki Umur : 43 Tahun Pekerjaan: Kepala Camat Tanjung Tiram	1. Bagaimana menurut camat peran pemerintah dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan wisata Pulau Pandang? 2. Bagaimana bentuk koordinasi antara kecamatan dengan dinas pariwisata? 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata?
Informan Tambahan	N a m a : Bayu Adrian Jenis Kelamin : Laki-Laki Umur: 30 Tahun Pekerjaan: Pelaku Usaha Trevel	1. Bagaimana perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang? 2. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap usaha travel wisata? 3. Apa kendala yang dihadapi dalam membawa wisatawan ke Pulau Pandang?
Informan Tambahan	N a m a : Muhammad Piere Dellon Jenis Kelamin : Laki-Laki Umur : 20 Tahun Pekerjaan : -	1. Dari mana Anda mengetahui wisata Pulau Pandang? 2. Bagaimana pendapat Anda mengenai fasilitas yang tersedia di Pulau Pandang? 3. Apakah Anda tertarik untuk kembali berkunjung ke Pulau Pandang?

3. Hasil Observasi

**PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BATU BARA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
LOKAL
(STUDI KASUS: WISATA PULAU PANDANG KECAMATAN TANJUNG
TIRAM KABUPATEN BATU BARA)**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kawasan wisata Pulau Pandang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, diperoleh beberapa temuan:

No	Hasil
1	Pulau Pandang memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik dengan pemandangan laut yang indah dan lingkungan yang masih alami.
2	Akses menuju Pulau Pandang masih menggunakan transportasi laut seperti kapal nelayan dan kapal wisata.
3	Sarana dan prasarana wisata di Pulau Pandang masih terbatas seperti fasilitas tempat istirahat, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya.
4	Masyarakat sekitar turut berperan dalam kegiatan wisata seperti menyediakan jasa transportasi laut dan pelayanan bagi wisatawan.
5	Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan wisata Pulau Pandang melalui promosi wisata dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

4. Hasil Wawancara

**PERAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BATU BARA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
LOKAL
(STUDI KASUS: WISATA PULAU PANDANG KECAMATAN TANJUNG
TIRAM KABUPATEN BATU BARA)**

Informan Utama

N a m a : Widaruna S.E
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Batu Bara.

Pertanyaan pertanyaan

1. Bagaimana peran dinas dalam pengembangan wisata Pulau Pandang?

Jawab :

Dinas melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, masyarakat setempat, serta pelaku usaha pariwisata untuk mendukung pengembangan destinasi wisata Pulau Pandang. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan pariwisata agar berjalan secara terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

dengan memberikan dukungan berupa kemudahan perizinan bagi pelaku usaha serta membuka ruang kerja sama dengan pihak travel dan sektor swasta.

2. Program apa saja yang telah dilakukan untuk mengembangkan wisata Pulau Pandang?

Jawab :

Program yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam mendukung pengembangan wisata Pulau Pandang antara lain berupa kegiatan promosi wisata, koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Promosi wisata dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata Pulau Pandang kepada masyarakat luas dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, dinas juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui melibatkan kelompok pemuda dan masyarakat setempat dalam kegiatan pengelolaan

wisata.

3. Bagaimana bentuk kerja sama antara dinas dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat?

Jawab :

Kerja sama antara Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dengan pemerintah kecamatan serta masyarakat dilakukan melalui koordinasi program pengembangan pariwisata dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata.

Dinas berupaya mengintegrasikan program pembangunan pariwisata dengan pemerintah daerah serta melibatkan masyarakat setempat dalam pemanfaatan potensi wisata Pulau Pandang. Keterlibatan masyarakat juga dilakukan melalui partisipasi kelompok pemuda seperti Karang Taruna serta pelaku usaha wisata lokal.

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata Pulau Pandang?

Jawab :

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata Pulau Pandang, terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang belum memadai, serta keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan wisata.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wisata. Pembangunan fasilitas pendukung wisata membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan diperkirakan mencapai sekitar dua hingga tiga miliar rupiah, sementara kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Selain itu, Pulau Pandang hingga saat ini belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dinas belum memiliki kewenangan untuk menarik retribusi dari objek wisata tersebut. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata secara optimal.

5. Apa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan potensi wisata Pulau Pandang?

Jawab :

langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata Pulau Pandang antara lain adalah penguatan promosi wisata, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Penguatan promosi dapat dilakukan melalui pemanfaatan media digital dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan informasi mengenai wisata Pulau Pandang.

Selain itu, peningkatan fasilitas wisata seperti akses transportasi, kebersihan, dan sarana pendukung lainnya perlu dilakukan agar wisatawan merasa lebih nyaman saat berkunjung.

Di samping itu, pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi strategi penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata, diharapkan destinasi wisata Pulau Pandang dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Informan Tambahan

N a m a : Muhammad Iqbal, S.Sos.,M.AP
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Kepala Camat Tanjung Tiram

Pertanyaan pertanyaan

1. Bagaimana menurut camat peran pemerintah dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung pengembangan wisata Pulau Pandang?

Jawab :

Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam pengembangan wisata Pulau Pandang dinilai sudah cukup baik dalam hal koordinasi dan dukungan terhadap pengelolaan potensi wisata daerah. Dinas telah melakukan beberapa upaya seperti promosi wisata serta menjalin komunikasi dengan pemerintah kecamatan terkait pengembangan destinasi wisata tersebut.

2. Bagaimana bentuk koordinasi antara kecamatan dengan dinas pariwisata?

Jawab :

Bentuk koordinasi antara pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram dengan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui komunikasi dan kerja sama dalam pelaksanaan program pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Pemerintah kecamatan berperan dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh dinas pariwisata serta membantu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata Pulau Pandang.

Koordinasi ini juga dilakukan melalui pertukaran informasi mengenai kondisi kawasan wisata, kebutuhan pengembangan fasilitas, serta potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Melalui koordinasi tersebut diharapkan pengelolaan wisata Pulau Pandang dapat berjalan secara terarah dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata?

Jawab :

Upaya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata dilakukan dengan mendorong masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan wisata Pulau Pandang. Masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti penyediaan jasa transportasi laut, pelayanan wisatawan, serta kegiatan ekonomi yang mendukung aktivitas pariwisata.

Selain itu, pemerintah kecamatan bersama dinas pariwisata juga berupaya memberikan dorongan kepada masyarakat agar memanfaatkan potensi wisata yang ada sebagai sumber pendapatan tambahan. Partisipasi masyarakat ini sangat penting karena keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat setempat.

Informan Tambahan

N a m a : Bayu Adrian
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Pelaku Usaha Trevel

Pertanyaan pertanyaan

1. Bagaimana perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang?

Jawab :

Perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pandang menunjukkan adanya potensi yang cukup baik, meskipun peningkatannya belum terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena Pulau Pandang memiliki daya tarik wisata alam yang cukup menarik seperti pemandangan laut yang indah dan suasana yang masih alami sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Namun demikian, jumlah wisatawan yang datang masih cenderung fluktuatif dan belum stabil. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan promosi wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta minimnya fasilitas pendukung di kawasan wisata tersebut. Selain itu, informasi mengenai wisata Pulau Pandang masih banyak diperoleh melalui rekomendasi dari pihak travel atau informasi dari mulut ke mulut dibandingkan dari promosi resmi pemerintah.

2. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap usaha travel wisata?

Jawab :

Dukungan pemerintah daerah terhadap usaha travel wisata dalam pengembangan wisata Pulau Pandang masih tergolong terbatas.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata lebih banyak memberikan dukungan dalam bentuk koordinasi serta kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha travel untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata dengan membuka peluang kerja sama dalam membawa wisatawan ke Pulau Pandang. Kehadiran pelaku usaha travel menjadi salah satu faktor penting dalam membantu memperkenalkan wisata Pulau Pandang kepada masyarakat luas.

3. Apa kendala yang dihadapi dalam membawa wisatawan ke Pulau Pandang?

Jawab :

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha travel dalam membawa wisatawan ke Pulau Pandang. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung wisata, seperti fasilitas umum yang masih belum memadai di kawasan wisata tersebut.

Selain itu, akses transportasi menuju Pulau Pandang juga masih menjadi tantangan karena wisatawan harus menggunakan transportasi laut seperti kapal atau perahu dari daerah pesisir untuk mencapai lokasi wisata. Kondisi ini terkadang dipengaruhi oleh faktor cuaca sehingga dapat memengaruhi kenyamanan serta keamanan perjalanan wisatawan.

Kendala lainnya adalah masih terbatasnya promosi wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga belum banyak masyarakat luar daerah yang mengetahui potensi wisata Pulau Pandang.

Informan Tambahan

N a m a : Muhammad Piere Dellon
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 20 Tahun
Pekerjaan : -

Pertanyaan pertanyaan

1. Dari mana Anda mengetahui wisata Pulau Pandang?

Jawab :

Sebagian besar wisatawan mengetahui keberadaan wisata Pulau Pandang melalui informasi dari teman, keluarga, serta rekomendasi dari pelaku usaha travel. Informasi mengenai destinasi wisata ini lebih banyak diperoleh melalui pengalaman orang lain atau promosi tidak langsung dibandingkan melalui promosi resmi dari pemerintah daerah.

2. Bagaimana menurut anda mengenai fasilitas yang tersedia di pulau pandang ?

Jawab :

Fasilitas yang tersedia di Pulau Pandang masih dinilai cukup terbatas dan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata secara

optimal. Beberapa fasilitas pendukung seperti sarana sanitasi, tempat istirahat, serta fasilitas umum lainnya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi wisatawan.

3. Apakah Anda tertarik untuk kembali berkunjung ke Pulau Pandang?

Jawab :

Menyatakan tertarik untuk kembali berkunjung ke Pulau Pandang. Hal ini disebabkan oleh daya tarik wisata alam yang dimiliki oleh Pulau Pandang, seperti pemandangan laut yang indah serta suasana yang masih alami dan relatif tenang.



5. Dokumentasi



Wisata Pulau Pandang



Dermaga yang Mangkrak



**Wawancara dengan wisatawan
Pulau Pandang**



**Wawancara dengan pelaku
usaha Travel P.Pandang**



**Wawancara dengan Bapak
Muhammad Iqbal, S.Sos.,MAP
Selaku Kepala Camat Tanjung Tiram**



**Wawancara dengan Bapak
Widaruna S.E
Selaku Kepala DISPORABUDPAR**

6. Surat Riset Lapangan



Nomor : 3799 /FIS.001.10/XI/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 10 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nur Syahfina Sitompul
N. P. M. : 228510006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam Pengembangan Pariwisata Lokal (Studi Kasus: Wisata Pulau Pinalang, Kecamatan Tanjung Tiru, Kabupaten Batu Bara)"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Yoris Lief Lubis, S.Sos, M.I.P.

Tembusan:

1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa yhs
3. Arsip



Dipindai dengan
CamScanner



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7358612 Medan 20223
Kampus II : Jalan Solabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8226602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umv_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2498 /FIS.0401.10/CX/2025
Lamp : 1
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 10 November 2025

Kepada Yth,
Bapak Camat Tanjung Tirani

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nur Syahfina Sitompul
N P M : 228510006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Camat Tanjung Tirani untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam Pengembangan Pariwisata Lokal (Studi Kasus: Wisata Pulau Pandang, Kecamatan Tanjung Tirani, Kabupaten Batu Bara)"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekam,

Dr. Yohanes Arief Lubis, S.Sos, M.P

Tembusan:

1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Tipindai dengan
CamScanner

7. Surat keterangan Selesai Riset

 **PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA
Jln. Besar Dusun III Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir,
Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara Kodepos 21255
Laman : www.dispora.batubarakab.go.id

Lima Puluh Pesisir, 8 Januari 2026

Nomor : 000.9.2 / 0046 / 2026
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data/Riset

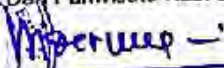
Yth:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di -
Tempat,-

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 3479/FIS.0/01.10/XI/2025 Tanggal 10 Nopember 2025 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset, maka dengan ini kami memberikan Izin Pengambilan Data/Riset kepada mahasiswa :

Nama : NUR SYAHFINA SITOMPUL
NPM : 228510008
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Riset : "Peran Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara dalam Pengembangan Pariwisata Lokal (Studi Kasus: Wisata Pulau Pandang, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)"

Demikian Surat Izin ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Rt. Kepala Dinas
Pemuda Olahraga Kebudayaan
Dan Pariwisata Kab. Batu Bara


Widaruna, SE
Penata Tk. I
NIP. 19790210 201101 1 0006



Dipindai dengan
CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN TANJUNG TIRAM
Jalan Pendidikan Dusun XII Desa Suka Maju Tanjung Tiram 21253
Email: KecamatanTanjungTiram@gmail.com

Tanjung Tiram, 06 Januari 2026

Nomor : 071/004
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Telah Selesai Melakukan Pengambilan
Data/Riset di Kecamatan Tanjung Tiram
Kabupaten Batu Bara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Nomor : 3478/FIS.01.10/XI/2025 Perihal Permohonan Izin
Pengambilan Data/Riset yang telah dilaksanakan oleh :

Nama : Nur Syahfina Sitompul
NPM : 228510006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, benar bahwa Nur Syahfina
Sitompul telah selesai melakukan pengambilan Data/Riset di Kantor Camat
Tanjung Tiram guna melengkapi Data Skripsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

An. CAMAT TANJUNG TIRAM
SEKRETARIS

Halimal Yusri, S.Kep.Ners
PEMBINA TK.I
NIP. 19700527 199503 1 002

Dipindai dengan
CamScanner